



Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2025

BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (RKT BKPK) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan turunan dari dokumen perencanaan kinerja 5 (lima) tahunan (Renstra dan Rencana Aksi Program (RAP), serta penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT BKPK Tahun 2025 memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai BKPK pada tahun 2025 serta anggaran yang dialokasikan. Dokumen RKT diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan kerja kerasnya dalam penyusunan RKT BKPK Tahun 2025.

Jakarta, Oktober 2025

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan



Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA KEGIATAN.....	8
A. VISI	8
B. MISI	8
C. TUJUAN	10
D. SASARAN.....	11
E. RENCANA KEGIATAN	12
BAB III. RENCANA KINERJA	15
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025	15
B. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	42
BAB IV. PENUTUP	43
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
DAFTAR KONTRIBUTOR	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Struktur Organisasi BKPK.....	6
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029	11
Tabel III.1 Rencana Kinerja BKPK Tahun 2025	16
Tabel III.2 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2025	42

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan, merupakan dokumen turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja.

RKT merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT dibuat dalam bentuk kegiatan rinci hasil penuangan matriks Renja K/L. Dalam perencanaan kinerja tersebut, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

Keterkaitan RKT dengan Renja-KL harus tercermin pada penggunaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program hingga indikator kinerja, target dan rencana alokasi anggaran tahun anggaran berjalan. RKT dan Renja-KL merupakan dokumen yang saling melengkapi dari sisi penjabaran kegiatan dan usulan alokasi anggarannya. Dalam kaitan ini, RKT melengkapi secara rinci menuangkan perencanaan anggaran yang tercermin dalam dokumen Renja-KL.

RKT BKPK Tahun 2025 memuat sasaran kinerja, program kinerja, indikator kinerja, target kinerja periodik, kegiatan/aktivitas dan rincian anggaran BKPK tahun 2025. Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja,

langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, Dokumen RKT dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja pada BKPK.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan tujuan:

1. sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL)
2. memberikan gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPK Tahun 2025, dan
3. dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Penyusunan dokumen RKT diharapkan memberikan gambaran keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2025-2029), sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- c. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;

- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi BKPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan;
- c. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan;
- d. Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global.



Sumber: Permenkes no. 21 tahun 2024

Gambar I.1 Struktur Organisasi BKPK

Ruang lingkup kebijakan BKPK dijabarkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Pusjak yang menyesuaikan dengan enam pilar transformasi kesehatan dan penugasan terkait dari Menteri Kesehatan sebagai berikut:

1. Sekretariat BKPK
Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan
2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
Melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehatan.

3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

Melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan.

4. Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan

Melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem sumber daya kesehatan.

5. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

Melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang strategi dan tata kelola kesehatan global

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA KEGIATAN

A. VISI

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkannya dalam visi bidang kesehatan, yaitu “Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut diwujudkan dengan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (i) pemenuhan layanan dasar, (ii) pembangunan modal manusia, serta (iii) pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan.

Pada bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan stunting serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

B. MISI

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan delapan misi Presiden yang disebut Asta Cita tahun 2025- 2029, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Guna memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden itu sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;

5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan Tujuan Strategis;
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
- 2) Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
- 3) Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;
- 4) Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
- 5) Teknologi Kesehatan yang maju; dan
- 6) Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

C. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. Teknologi Kesehatan yang maju;
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung tujuan di atas, diperlukan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan cakupan layanan esensial menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Akses terhadap layanan yang adil akan mengurangi kesenjangan, mempercepat deteksi dan penanganan penyakit, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dalam situasi darurat seperti pandemi, sistem kesehatan yang tangguh dan responsif juga dibutuhkan. Tercapainya

tujuan-tujuan tersebut juga turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dan pembiayaan kesehatan. Di sisi lain, kemajuan teknologi kesehatan juga diukur dari persentase populasi yang menggunakan sistem informasi kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk membangun tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal melalui penerapan prinsip-prinsip birokrasi dan layanan yang agile, efektif, dan efisien.

D. SASARAN

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif
		1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif	3.1	Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
5	Teknologi Kesehatan yang Maju	5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
6	Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

E. RENCANA KEGIATAN

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai unsur pendukung di Kementerian Kesehatan bertugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, BKPK merumuskan sasaran program yang diarahkan pada dua aspek utama, yaitu sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta peningkatan kecukupan, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pendanaan kesehatan. Sasaran program tersebut dikelola bersama oleh unit-unit BKPK yang dijabarkan sebagai berikut:

Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1. Sasaran Program: Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Sinkronisasi kebijakan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu prasyarat utama dalam memastikan konsistensi pencapaian indikator kesehatan nasional. Melalui sasaran ini, BKPK berfokus pada peningkatan keterpaduan kebijakan lintas level pemerintahan agar seluruh indikator kesehatan nasional dapat dicapai secara seragam serta peningkatan kualitas kebijakan kesehatan. Indikator utama yang digunakan meliputi:

- **IKP 26.2: Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional**, dengan target 15% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan upaya penguatan advokasi dan asistensi kebijakan ke daerah. Pencapaian indikator ini akan mendorong terbentuknya regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, serta memperkuat implementasi indikator kesehatan di tingkat lokal. Pengukuran akan dilakukan berbasis data kebijakan daerah yang terekam di Data Pemda, Kemendagri JDIH.
- **IKP 26.3: Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%**, dengan target 50% di tahun 2025. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai bentuk kewajiban dasar pelayanan publik. Ini menuntut kebijakan yang efektif dalam mendorong akuntabilitas daerah, dimonitor melalui data Kemendagri.

- **IKP 26.4: Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan**, dengan target nilai 83 pada tahun 2025. Peningkatan nilai kualitas kebijakan dimaksudkan untuk menjamin tersusunnya kebijakan yang lebih responsif, berbasis bukti, serta mendukung pelaksanaan program kesehatan secara nasional.

Dengan demikian, sasaran ini menekankan pentingnya konsistensi regulasi, harmonisasi kebijakan pusat-daerah, serta peningkatan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Sasaran Program: Meningkatnya Kecukupan, Efektivitas, Efisiensi, Keadilan, dan Keberlanjutan Pendanaan Kesehatan

Pendanaan kesehatan yang memadai dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting untuk menjamin terselenggaranya sistem kesehatan nasional yang kuat. Sasaran program ini diarahkan pada penguatan sistem pendanaan kesehatan yang efisien dan berkelanjutan dalam sistem kesehatan baik melalui optimalisasi belanja pemerintah, peningkatan investasi, maupun pencapaian target global kesehatan. Indikator yang digunakan meliputi:

- **IKP 27.3: Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan**, dengan target 10% pada tahun 2025. Indikator ini akan mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah agar alokasi belanja kesehatan lebih efektif dan proporsional sesuai kebutuhan. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan akuntabilitas dan tata kelola fiskal di daerah.
- **IKP 28.1: Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan**, dengan target 19% pada tahun 2025. Peningkatan investasi diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan kesehatan melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk swasta, dan mendukung pertumbuhan industri kesehatan nasional.
- **IKP 28.2: Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional**, dengan target 50% pada tahun 2025. Indikator ini menunjukkan kontribusi Indonesia dalam pencapaian target kesehatan global sesuai komitmen internasional dengan menggunakan data dari Kemenkes sebagai sumber evaluasi.

Melalui sasaran ini, BKPK berupaya memastikan keberlanjutan pembiayaan kesehatan dengan pendekatan bauran pendanaan, peningkatan investasi, serta kontribusi aktif dalam pencapaian target kesehatan global.

Dengan dirumuskannya sasaran program sebagaimana diuraikan di atas, BKPK berkomitmen untuk mendorong terwujudnya tata kelola kebijakan kesehatan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah, sekaligus memastikan tersedianya pendanaan kesehatan yang cukup, efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan.

BAB III. RENCANA KINERJA

A. RENCANA KINERJA BKPK TAHUN 2025

Rencana kinerja BKPK tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang tertuang pada Permenkes Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, terdapat enam tujuan dan tujuh sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. BKPK mendukung tujuan ke-5, yaitu Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif, pada sasaran strategis ke 1 dan 2, yakni 5.1 Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah; dan 5.2 Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan; tujuan ke 7, yakni 7 Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien; serta sasaran strategis ke-1, yakni 7.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan. Indikator Kinerja BKPK tahun 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel III.1 Rencana Kinerja BKPK Tahun 2025

(dalam ribu rupiah)

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN (seluruh anggaran BKPK TA 2025 pada Program Yankes JKN diblokir)			
Sasaran Program : Terpenuhinya Pembiayaan Kesehatan dalam mencapai UHC			
IKP: Persentase Belanja Kesehatan Out of Pocket Masyarakat Berpengeluaran 40% terbawah		3,98%	
Sasaran Program: Meningkatnya Kecukupan Pendanaan Kesehatan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
IKP 27.1 Persentase Pertumbuhan Belanja Kesehatan dari Sektor Publik		5%	
IKP 27.2 Persentase Pertumbuhan Belanja Kesehatan dari Sektor Non Publik		1%	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan			
IKK 19.1.2 Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan		100%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6804.AEA Koordinasi	4 Kegiatan	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6804.AEA.001 Audit Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut	1 Kegiatan	1.044.220
	Rincian Output: 6804.AEA.002 Fasilitasi Penyusunan Regulasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	1 Kegiatan	437.450
	Rincian Output: 6804.AEA.003 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan	1 Kegiatan	1.296.546
	Rincian Output: 6804.AEA.004 Fasilitasi Dewan Pertimbangan Klinis	1 Kegiatan	549.840
	Klasifikasi Rincian Output: 6804.AEF Sosialisasi dan Diseminasi	3000 orang	
	Rincian Output: 6804.AEF.001 Orang yang Mendapatkan Advokasi Pembiayaan Kesehatan untuk Kegiatan Promotif dan Preventif	3.000 orang	1.777.514
	Klasifikasi Rincian Output: 6804.DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	300 orang	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6804.DCM.001 Tenaga Koder FKRTL yang Mengikuti Pelatihan Koding dalam Program JKN	300 orang	4.205.010
	Klasifikasi Rincian Output: 6804.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan	
	Rincian Output: 6804.FAE.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1 Laporan	240.000
	Rincian Output: 6804.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	
	Rincian Output: 6804.FBA.001 Penguatan Pelaksanaan Health Accounts (PHA/DHA) di Daerah	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.928.980
Program: DS.Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
Sasaran Program : Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah			
IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional		15%	
IKP 26.3 Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%		50%	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
IKP 26.4 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan		83	
Sasaran Program: Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan			
IKP 27.3 Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan		10%	
IKP 28.1 Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan		19%	
IKP 28.2 Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional		50%	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.2 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah I		15%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6833.AEA Koordinasi		
	Rincian Output: 6833.AEA.003 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Upaya Kesehatan	1 Kegiatan	1.000.778
IKK 26.4.1 Persentase analisis kebijakan di bidang Upaya Kesehatan		80%	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Klasifikasi Rincian Output 6833.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	31 RK	
	Rincian Output: 6833.ABG.011 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Upaya Kesehatan	5 RK	933.350
	Rincian Output: 6833.ABG.012 Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Primer	4 RK	1.100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.013 Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Rujukan	4 RK	1.100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.014 Kajian Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan Masyarakat	4 RK	1.100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.015 Kajian Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	4 RK	1.100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.016 Kajian Evaluasi Kebijakan Promosi Kesehatan, Deteksi Dini dan Pengendalian PTM	4 RK	990.208

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6833.ABG.017 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat	1 RK	188.830
	Rincian Output: 6833.ABG.018 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Perseorangan	1 RK	100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.019 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer	1 RK	100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.020 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Layanan Kesehatan Lanjutan dan Klinis	1 RK	171.624
	Rincian Output: 6833.ABG.021 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan	1 RK	175.000
	Klasifikasi Rincian Output 6833.AEA Koordinasi	8 Kegiatan	
	Rincian Output: 6833.AEA.004 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan	1 Kegiatan	1.098.523

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6833.AEA.005 Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	6 Kegiatan	800.010
	Klasifikasi Rincian Output 6833.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	1 RK	
	Rincian Output: 6833.PBG.004 Survei Konsumsi Makanan Individu	1 RK	75.280.000
	Rincian Output: 6833.PBG.005 Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1 RK	1.460.221
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah II		15%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6834.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	
	Rincian Output: 6834.AEA.004 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Kegiatan	550.230

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6834.AEA.007 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1 Kegiatan	131.691
IKK 26.4.2 Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 6833.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	21 RK	
	Rincian Output: 6834.ABG.041 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	4 RK	3.566.184
	Rincian Output: 6834.ABG.042 Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Alat Kesehatan	3 RK	1.173.826
	Rincian Output: 6834.ABG.043 Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Farmasi	3 RK	1.181.054
	Rincian Output: 6834.ABG.045 Kajian Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	3 RK	1.111.854

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6834.ABG.046 Kajian Evaluasi Kebijakan Penyediaan, Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	3 RK	1.111.854
	Rincian Output: 6834.ABG.047 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1 RK	19.000
	Rincian Output: 6834.ABG.048 Rekomendasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan dan Perubahan Iklim	1 RK	72.860
	Rincian Output: 6834.ABG.049 Evaluasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	1 RK	893.330
	Rincian Output: 6834.ABG.050 Evaluasi Kebijakan Strategi Imunisasi, Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan	1 RK	147.011
	Rincian Output: 6834.ABG.051 Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan dan Strategi Tata Kelola Keracunan	1 RK	65.621

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Klasifikasi Rincian Output: 6834.AEA Koordinasi	5 Kegiatan	
	Rincian Output: 6834.AEA.005 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Kegiatan	485.812
	Rincian Output: 6834.AEA.006 Quality Control Rancangan Regulasi bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	3 Kegiatan	316.845
	Rincian Output: 6834.AEA.008 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1 Kegiatan	97.828
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem sumber daya kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.4 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah III		15%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6834.AEA Koordinasi	1 Kegiatan	
	Rincian Output: 6834.AEA.010 Penyusunan Perencanaan Kajian	1 Kegiatan	36.987

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Kesehatan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan		
IKK 26.4.3 Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 6834.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	4 RK	
	Rincian Output: 6834.ABG.052 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1 RK	230.000
	Rincian Output: 6834.ABG.053 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi SDM Kesehatan	1 RK	344.000
	Rincian Output: 6834.ABG.054 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan	1 RK	640.000
	Rincian Output: 6834.ABG.055 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Integrasi Sumber Daya Kesehatan	1 RK	251.500
	Klasifikasi Rincian Output: 6834.AEA Koordinasi	1 Kegiatan	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6834.AEA.011 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1 Kegiatan	41.300
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti			
IKK 26.3.1 Persentase capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota yang telah divalidasi		10%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6835.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan	
	Rincian Output: 6835.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Ketercapaian SPM Kesehatan	1 Laporan	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan			
IKK 27.3.1 Pemenuhan pembiayaan untuk mendukung terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan		50 Kab/Kota	
	Klasifikasi Rincian Output: 6835.AEA Koordinasi		
	Rincian Output: 6835.AEA.005 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan	1 Kegiatan	433.576

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan		
Sasaran Kegiatan: Tersedianya bahan kebijakan bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan			
IKK 28.1.1 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang farmasi		12%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 RK	
	Rincian Output: 6835.ABG.018 Rekomendasi Kebijakan National Health Accounts	1 RK	2.128.813
	Rincian Output: 6835.ABG.019 Rekomendasi kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang farmasi	1 RK	107.140
IKK 28.1.2 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang alat kesehatan		16%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 RK	
	Rincian Output: 6835.ABG.014 Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assessment	1 RK	4.517.658

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6835.ABG.020 Rekomendasi kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang alkes	1 RK	137.712
	Klasifikasi Rincian Output: 6835.AEA Koordinasi	5 Kegiatan	
	Rincian Output: 6835.AEA.001 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1 Kegiatan	491.475
	Rincian Output: 6835.AEA.002 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1 Kegiatan	837.800
	Rincian Output: 6835.AEA.003 Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	3 Kegiatan	546.360
	Klasifikasi Rincian Output 6835.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	7 RK	
	Rincian Output: 6835.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assessment	6 RK	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6835 PBG 002 Rekomendai kebijakan pendanaan kesehatan	1 RK	
IKK 28.1.3 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan		25%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	8 RK	
	Rincian Output: 6835.ABG.011 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan	1 RK	509.880
	Rincian Output: 6835.ABG.012 Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat dalam Program JKN	1 RK	800.150
	Rincian Output: 6835.ABG.013 Rekomendasi Kebijakan Sinergi Pembiayaan Pusat dan Daerah	2 RK	1.354.880
	Rincian Output: 6835.ABG.015 Rekomendasi Kebijakan INA Grouper dalam Program JKN	1 RK	1.093.850
	Rincian Output: 6835.ABG.016 Rekomendasi Kebijakan Annual	1 RK	1.222.252

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dalam Program JKN		
	Rincian Output: 6835.ABG.017 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Metode Pembayaran di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	1 RK	1.160.700
	Rincian Output: 6835.ABG.021 Rekomendasi kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang fasyankes	1 RK	19.982
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti			
IKK 26.2.5 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah IV		15%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	
	Rincian Output: 6836.AEA.003 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan	1 Kegiatan	289.938
	Rincian Output: 6836.AEA.006 Penyusunan Perencanaan Kajian	1 Kegiatan	192.742

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Kesehatan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		
IKK 26.4.4 Persentase analisis kebijakan di bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	18 RK	
	Rincian Output: 6836.ABG.031 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	2 RK	393.240
	Rincian Output: 6836.ABG.032 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Bilateral	2 RK	692.625
	Rincian Output: 6836.ABG.033 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Regional	2 RK	693.638
	Rincian Output: 6836.ABG.034 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Multilateral	2 RK	692.422
	Rincian Output: 6836.ABG.035 Kajian Evaluasi Kebijakan Hibah dan Pinjaman	2 RK	690.570

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6836.ABG.036 Kajian Evaluasi Kebijakan Bioteknologi	2 RK	687.742
	Rincian Output: 6836.ABG.037 Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan	2 RK	692.422
	Rincian Output: 6836.ABG.038 Rekomendasi kebijakan pengembangan kebijakan baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1 RK	175.150
	Rincian Output: 6836.ABG.039 Evaluasi Kebijakan Mitra Pembangunan	1 RK	156
	Rincian Output: 6836.ABG.040 Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Kesehatan	1 RK	42.680
	Rincian Output: 6836.ABG.041 Evaluasi Kebijakan Transformasi Kesehata	1 RK	120.505
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	
	Rincian Output: 6836.AEA.005 Quality Control Rancangan	2 Kegiatan	335.920

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Regulasi bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan			
IKK 28.2.1 Jumlah peran strategis Indonesia pada Ol/pertemuan internasional bidang kesehatan		17 Kegiatan	
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEC Kerja sama		
	Rincian Output: 6836.AEC.005 Dokumen pinjaman hibah luar negeri	3 Kesepakatan	598.081
	Rincian Output: 6836.AEC.006 Dokumen kerja sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan	2 Kesepakatan	1.957.981
	Rincian Output: 6836.AEC.011 Dokumen kerja sama luar negeri regional bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	3.058.641
	Rincian Output: 6836.AEC.012 Dokumen kerja sama luar negeri bilateral bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	928.432
	Rincian Output: 6836.AEC.013 Kontribusi Indonesia pada	2 Dokumen	98.743.000

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	organisasi internasional non pemerintah		
	Rincian Output: 6836.AEC.014 Operasionalisasi ACPHEED	1 Dokumen	8.249.466
	Rincian Output: 6836.AEC.015 Dokumen mitra pembangunan kesehatan	1 Kesepakatan	680.660
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEG Konferensi dan Event		
	Rincian Output: 6836.AEG.001 Tuan rumah penyelenggaraan pertemuan internasional	2 Kegiatan	6.114.791
	Rincian Output: 6836.AEG.003 Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan	20 Kegiatan	6.524.031
IKK 28.2.2 Persentase target kesehatan nasional selaras dengan target global		80%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	
	Rincian Output: 6836.AEA.004 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1 Kegiatan	1.042.189

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6836.AEA.007 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1 Kegiatan	143.376
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEC Kerja sama	3 Kesepakatan	
	Rincian Output: 6836.AEC.003 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	887.362
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Integrasi dan Sinergi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan			
IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional		15%	
	Klasifikasi Rincian Output 6837.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 6837.ABG.001 Analisis Situasi Kesehatan	1 RK	3.247.286
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6837.AEA.001 Advokasi dan komunikasi kebijakan kesehatan	1 Kegiatan	1.382.302
	Rincian Output: 6837.AEA.002 Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1 Kegiatan	1.252.600
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		77 (nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3 Layanan	909.276
IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		92,35 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output 6797.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.CAN.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	615.830
	Klasifikasi Rincian Output 6797.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Rincian Output: 6797.CCL.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	1.266.072
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.956 Layanan BMN	1 Layanan	373.818
	Rincian Output: 6797.EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan	608.050
	Rincian Output: 6797.EBA.959 Layanan Protokoler	1 Layanan	379.829
	Rincian Output: 6797.EBA.962 Layanan Umum	5 Layanan	5.766.160
	Rincian Output: 6797.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	161.002
	Rincian Output: 6797.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	5 Layanan	136.495

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	54.442.978
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	Rincian Output: 6797.EBB.951 Layanan Sarana Internal	11 Unit	1.625.480
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBC Layanan Manajemen SDM Internal		
	Rincian Output: 6797.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	280 Orang	2.526.909
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	Rincian Output: 6797.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	1.273.945
	Rincian Output: 6797.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	597.937
	Rincian Output: 6797.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	742.474
	Rincian Output: 6797.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	451.369

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	100.522
IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		81 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBC Layanan Manajemen SDM Internal		
	Rincian Output: 6797.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	564 Orang	1.155.699
IKK 33.4.16 Nilai maturitas manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		3,95 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	241.796
IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		95%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	85.256

B. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Anggaran BKPK yang disetujui tahun 2025 sebesar Rp 339.979.964.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Anggaran ini digunakan untuk tiga Program dan tujuh kegiatan utama dengan rincian pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (ribuan)
I.	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	11.479.560.000
1.	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	11.479.560.000
II.	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	255.039.507.000
1.	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	86.698.544.000
2.	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	12.468.787.000
3.	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	15.362.228.000
4.	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	134.627.760.000
5.	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	5.882.188.000
III.	Program Dukungan Manajemen	73.123.731.000
1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	73.123.731.000
Total Anggaran		339.979.964.000

BAB IV. PENUTUP

Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan meliputi pelaksanaan penyusunan kebijakan berbasis bukti, baik berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pengkajian kesehatan, juga berdasarkan data informasi lain yang relevan mencakup kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sektor lain (Kementerian dan Lembaga) dan pemerintah daerah. dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan, diperlukan harmonisasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah untuk mendorong mengoptimalkan dana fungsi kesehatan dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan kesehatan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas keselarasan perencanaan dan penganggaran pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang berkontribusi atas penyusunan dokumen RKT BKPK Tahun 2025 ini. Besar harapan kami dokumen ini dapat bermanfaat. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, tim penyusun menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen RKT BKPK tahun 2025 sangat diharapkan agar dokumen RKT ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN I

RENJA KL PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

TAHUN 2025

LAMPIRAN II
DIPA BKPK TAHUN 2025

DAFTAR KONTRIBUTOR

Penasihat

Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D. (Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Penanggung Jawab

dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H (Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Tim Penyusun

Tri Ramadhany (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Sari Ramadhani (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Fairuz Wardaty (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Titin Delia (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Martin Lasty Marbun (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Kontributor

Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan

Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

